



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Catatan sikap JSMP mengenai pengalokasian Anggaran Belanja Negara 2019 untuk sektor peradilan

Diajukan kepada:

Parlemen Nasional

2018

Daftar Isi

Pengantar	3
Anggaran	3
Tabel anggaran untuk sektor peradilan 2018 dan 2019	4
Pengadilan Keliling	4
Total kasus dari pengadilan keliling dari setiap pengadilan	5
Pelatihan tambahan	Error! Bookmark not defined.
Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan (SFJJ)	6

Pengantar

Pertama-tama, atas nama JSMP, kami ingin memuji dan memberi selamat kepada semua anggota Parlemen Nasional yang terhormat. JSMP dan semua rakyat Timor-Leste menaruh kepercayaan dan harapan penuh kepada Anda untuk membuat keputusan yang "bijaksana" dan "bertanggung jawab" untuk memastikan bahwa rakyat dan negara dapat memiliki standar hidup, keselamatan, dan kemakmuran yang baik di masa depan.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, JSMP sangat bangga dan merasa terhormat karena rakyat terus memiliki kepercayaan kepada para pemimpin mereka untuk memastikan demokrasi di Timor-Leste dan memberikan kesempatan kepada semua orang Timor-Leste untuk berpartisipasi dalam membangun Negara dan pembangunan nasional.

Anggaran Belanja Negara adalah satu-satunya sumber dan komponen penting dari rencana pembangunan nasional. Anggaran Belanja Negara 2019 yang diusulkan adalah \$ 1,827 miliar. Dibandingkan dengan anggaran sebelumnya, Anggaran Belanja Negara 2019 sangat besar dan menandai sebuah halaman baru dalam sejarah Timor-Leste.

Seperti organisasi masyarakat sipil lainnya, JSMP juga sangat prihatin dengan dampak alokasi dan pelaksanaan Anggaran Negara setiap tahun, terutama alokasi anggaran yang tidak konsisten ke sektor-sektor produktif yang juga mempengaruhi sektor peradilan. JSMP mengakui bahwa JSMP tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek tertentu dari anggaran, oleh karena itu dalam usulan ini JSMP akan membatasi komentarnya pada bidang-bidang tertentu di sektor peradilan tanpa menyentuh sektor lain yang benar-benar di luar kapasitas dan pengetahuan JSMP. JSMP telah mengamati bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor peradilan lebih kecil daripada anggaran yang disediakan untuk sektor lain. JSMP juga telah mengamati bahwa setiap tahun sektor-sektor ini diberi prioritas, tetapi tidak ada hasil positif yang telah dicapai sejauh ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

JSMP berharap bahwa usual ini akan membantu anggota parlemen melakukan analisis mendalam sebelum membuat keputusan tentang bagaimana meningkatkan anggaran yang diusulkan untuk sektor peradilan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas layanan di sektor ini dan mempromosikan keadilan yang lebih dekat kepada rakyat.

Anggaran

Pada tahun 2019, anggaran yang dialokasikan dan disetujui untuk sektor peradilan adalah US \$ 34.939.000, dimana ada peningkatan dari 2018. Dari jumlah ini Kementerian Kehakiman akan menerima US \$ 22.872.000, pengadilan akan menerima US \$ 7.541.000, dan Kantor Jaksa Agung akan menerima US \$ 4.526.000. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pengadilan meningkat, peningkatan ini hanya untuk Pengadilan Banding dan pengadilan distrik, dan dana telah dikurangi secara drastis untuk Dewan Tinggi Kehakiman. Sementara dana untuk lembaga lain di sektor peradilan akan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

JSMP juga telah mengamati bahwa dalam Buku 4a dari Anggaran 2019 yang diusulkan untuk Kantor Pembela Umum dan Buku 4b untuk Kantor Kejaksaan Umum telah dikurangi alokasi untuk perjalanan lokal dan pembangunan kapasitas. Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan agar dana dialokasikan ke dua wilayah ini untuk memungkinkan pengadilan keliling beroperasi serta untuk peningkatan kapasitas petugas dari Kejaksaan Umum dan agen dari Kantor Pembela Umum.

Tabel anggaran untuk sektor peradilan 2018 dan 2019

	Orsamentu 2018	Orsamentu 2019	% sae/tun
Kementerian Kehakiman, mencakup;	US\$. 16.294.00	US\$. 22,872.00	Sa'e 29%
· Kantor Pembela Umum	US\$. 1. 530.00	US\$. 1,535.00	Sa'e 0.33%
· Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan	US\$. 177.00	US\$. 203.00	Meningkat: 12,8%
Pengadilan mencakup;	US\$. 2,974.00	US\$. 7,541.00	Sa'e 61%
· Pengadilan Tinggi	US\$. 2, 106	US\$. 5,725.00	Sa'e 63%
Pengadilan Negeri/Distrik	US\$. 360.00	US\$. 1,751.00	Sa'e 79.4%
· Dewan Tertinggi Kehakimana.	US\$. 508.00	US\$. 64.00	berkurang - 693.75%
Kantor Kejaksaan Umum	US\$. 2, 594.00	US\$. 4,526.00	Meningkat 43%

Pengadilan Keliling

Pengadilan Keliling merupakan sebuah inisiatif untuk memungkinkan akses dan memenuhi kebutuhan orang-orang di daerah pedesaan untuk mengakses keadilan dan mereka memperkuat kebijakan mendekatkan keadilan untuk rakyat. Program Akses terhadap Keadilan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkenalkan inisiatif ini pada tahun 2010. JSMP telah mengamati bahwa selama ini dana untuk pengadilan keliling telah ditanggung oleh UNDP. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh JSMP tentang program ini, ini akan berakhir tahun ini dan tidak akan dilanjutkan di masa depan.

Pengadilan Keliling memainkan dua peran penting; pertama mendekatkan keadilan kepada masyarakat di daerah pedesaan melalui pengadilan yang dilakukan oleh aktor peradilan, dan yang lainnya meningkatkan kesadaran tentang peran aktor peradilan selama proses persidangan. Kehadiran pengadilan keliling di daerah pedesaan memiliki efek multidimensi pada masyarakat

di daerah pedesaan karena persidangan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan biaya perjalanan, akomodasi dan masalah dengan penundaan yang terjadi di pengadilan distrik.

JSMP percaya bahwa prakarsa/inisiatif program pengadilan keliling ini akan terus relevan dan penting sampai Negara memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk membentuk pengadilan distrik di kotamadya atau distrik yang harus memiliki pengadilan mereka sendiri.

Di antara pengadilan distrik, Pengadilan Distrik Baucau secara teratur melakukan pengadilan keliling dua kali sebulan, selama minggu kedua dan keempat.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah total atau persidangan yang dilakukan oleh pengadilan keliling yang dicatat oleh JSMP dari 2013 hingga Oktober 2018.

Total kasus yang disidangkan melalui pengadilan keliling di setiap pengadilan

Pengadilan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018 (Jan-Okt)
Dili	8	12	23	11	6	18
Baukau	1	63	104	52	96	18
Suai	26	88	111	82	45	68
Oekusi	0	0	0	0	0	0
Total	35	163	238	145	147	104

JSMP merekomendasikan kepada Parlemen dan Pemerintah untuk mengalokasikan dana yang cukup dan teratur untuk program pengadilan keliling ke masing-masing pengadilan distrik berdasarkan praktik-praktik yang ada.

Pelatihan Tambahan

JSMP menganggap pelatihan menjadi sangat penting bagi aktor peradilan. Pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan aktor peradilan di bidang-bidang spesifik yang relevan. Ini karena hakim, jaksa dan pembela umum perlu meningkatkan pengetahuan mereka dan terus mengikuti masalah peradilan dan teknis yang terus berubah dari waktu ke waktu dan tempat.

Tabel anggaran belanja negara untuk tahun ini menunjukkan bahwa pengadilan distrik hampir tidak memiliki anggaran untuk pengembangan kapasitas dan dana hampir mendekati nol. Oleh karena itu, JSMP prihatin dan merekomendasikan kepada anggota parlemen untuk memasukkan anggaran untuk bidang ini dalam Anggaran 2019.

JSMP merekomendasikan agar pelatihan disediakan untuk isu-isu atau topik yang berkaitan dengan hukum internasional yang diratifikasi oleh Timor-Leste dan bentuk-bentuk kejahatan

transnasional yang melibatkan kelompok-kelompok ekstremis seperti kejahatan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, kejahatan cybernetic, perdagangan senjata, bahan nuklir, terorisme, dll.

Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan (SFJJ)

Pada 2018 jumlah hakim, jaksa dan pembela umum tidak berubah dari 2017. Ini terjadi karena Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan baru dibuka kembali pada Mei 2017. Karena itu, mungkin akan ada peningkatan aktor peradilan baru dalam beberapa tahun ke depan, tetapi pelatihan telah berhenti lagi tahun ini.

JSMP merekomendasikan agar mekanisme pelatihan ditingkatkan sehingga kualitas pelatihan dapat dipastikan, terutama yang berkaitan dengan kurikulum dan pengenalan instrumen internasional termasuk undang-undang tambahan lainnya. Penting bagi Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan untuk menghasilkan aktor peradilan dan pengacara baru di Kantor Pembela Umum yang berkualitas tinggi dan berkualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

Saat ini pengadilan menghadapi tantangan serius berkaitan dengan sumber daya manusia yang berdampak pada kualitas dan produktivitas pengadilan. Contoh nyata adalah hampir tidak ada pengadilan kasus perdata atau hanya jumlah yang sangat kecil. Pengadilan kasus perdata penting karena mereka sangat terkait dengan investasi asing. Investor asing akan memiliki keraguan untuk berinvestasi jika yurisdiksi sipil di Timor-Leste tidak berfungsi secara efektif atau tidak berfungsi sama sekali.

JSMP mengamati bahwa peningkatan anggaran untuk pelatihan hukum dan peradilan tidak signifikan dan tidak akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelatihan. Oleh karena itu, JSMP meminta Negara untuk mengalokasikan dana/anggaran yang cukup kepada Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan untuk menyediakan fasilitas yang efektif dan memberikan prioritas pada perekrutan dan pelatihan yang sedang berlangsung untuk para hakim, jaksa dan agen dari Kantor Pembela Umum. Ini juga akan memungkinkan pelatihan komplementer untuk meningkatkan kualitas lulusan dan peningkatan yang berkelanjutan dalam jumlah aktor peradilan untuk menyesuaikan dengan rencana pemerintah untuk mendirikan pengadilan di masing-masing kotamadya.

Dili, 6 Desember 2018

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP